

BAB 6

Kesinambungan Peran Diplomasi Multilateral *Middle Power* Indonesia Sebagai Pembangun Jembatan (*Bridge-Builder*): Refleksi Dari DK PBB

A. Realita Diplomasi Multilateral Indonesia Sebagai *Middle Power*

Realita pertama, ada empat peran yang bisa diambil oleh sebuah negara *middle power* dalam diplomasinya: (1) menjadi penengah dalam mediasi (*mediator*) dalam menengahi konflik di antara pihak untuk bertemu dan melakukan interaksi terdahulu serta memastikan ada lingkungan dan strategi yang tepat dalam mediasi (Bercovitch & Houston, 1993); (2) mengambil peran sebagai pembangun jembatan (*bridge-builder*) yang konteksnya lebih dalam dari seorang mediator. Pembangun jembatan dalam hal ini berperan untuk membangun relasi dan hubungan serta menjembatani perbedaan dan celah – celah yang menghambat hasil diplomasi, yang di mana hal ini kembali diperdebatkan pada studi sebelumnya dalam konstruksi pemikiran neoliberal (Haas, 1967); (3) peran sebagai penyeimbang (*balancer*), yang di mana peran untuk menyeimbangkan ini sangat erat dengan narasi akan pentingnya pengelolaan diplomasi multilateral negara terhadap *major power* yang lebih kuat dalam forum, serta bagaimana negara menentukan sikap terhadap kesepakatan multilateral dan persepsi yang dibangun terhadap sebuah negara *major power* (Levick & Schulz, 2020; Agnol, 2018); dan (4) peran advokasi yang menyuarakan multilateralisme dan *sense of belonging* negara terhadap sistem internasional (*international understanding*) yang mendorong agar setiap aktor memiliki pandangan yang lebih mengglobal/ globalis ketimbang pandangan lokal/ nasional (Setiadi, 2015; Dermawan, 2019). Semua peran ini sendiri terbentuk dalam proses sebuah negara untuk memainkan pendekatan diplomasi multilateralnya sebagai sebuah negara *middle power*.

Realita kedua dalam konteks Indonesia, tentu penulis percaya bahwa peran negara *middle power*, spesifiknya sebagai pembangun jembatan, merupakan salah satu opsi strategis yang memiliki banyak irisan yang sangat sesuai dengan realita polugri Indonesia. Perlu diketahui bahwa politik luar negeri dalam perspektif peran sebagai

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bridge builder atau pembangun jembatan akan fokus pada mencari koneksi hubungan yang bisa dijadikan suatu basis kerja sama di tengah perbedaan. Oleh karena itu kemudian penulis juga membahas bahwa penting untuk Indonesia melihat cara bagaimana menjaga kesinambungan perannya agar berkelanjutan. Kesinambungan, menurut penulis terbentuk dari tataran ide, namun tentu tidak lepas dari kerangka pemikiran yang sama akan memiliki struktur, proses, dan performanya (Drezner, 2001). Tentunya adanya konvergensi di antara ketiga hal ini akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang koheren dalam konteks sebagai muatan substansi diplomasi *middle power*. Apabila negara melakukan sesuatu perubahan/ restrukturisasi, maka ketiga konvergensi tadi yang sebelumnya telah terbentuk secara kuat dalam tata kelola kebijakan nasional akan menjadi acuan berpikir selanjutnya. Lebih lanjut, penulis berargumen bahwa struktur, proses, dan performa kebijakan luar negeri *middle power* tidaklah dapat menjadi suatu kuantifikasi pengukuran semata, tetapi merupakan suatu bentuk observasi yang lebih bersifat *helicopter view* untuk mengukur konsentrasi isu fokus suatu negara *middle power* ketika berpartisipasi secara rutin pada forum seperti DK PBB.

Realita ketiga, penulis akan berbicara terkait klasifikasi aksi penting dalam bersikap dan apa yang harus dilakukan sebagai dasar dari menjaga kesinambungan peran sebagai pembangun jembatan dalam forum multilateral *vis-a-vis* DK PBB. Hal ini umumnya menjadi acuan dalam menilai mana *middle power* yang perannya sudah dalam tahapan bertumbuh, meningkat, maupun masih belum terbentuk. Klasifikasi ini sendiri terbentuk dalam level multilateral Dalam menjadi seorang negara yang memiliki kekuatan diplomasi untuk bergerak membangun jembatan antara perbedaan kepentingan (*being a bridge builder*) tentunya memerlukan beberapa kekuatan diplomasi multilateral untuk dilakukan sebuah negara *middle power*. Untuk menilai apakah negara tersebut sudah tumbuh atau belum kebijakan luar negeri *middle power*, maka akan ada tiga hal yang harus menjadi gagasan penulis. Pertama, tentunya dibutuhkan kemampuan Indonesia untuk mencari *like minded countries* terutama untuk

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mendorong pandangan yang sama dalam membangun kekuatan *middle power* dalam menyuarkan posisi dan pengaturan norma. Namun tentu Indonesia harus selektif agar ketika Indonesia mencari *like minded countries* karena untuk memastikan agar proses diplomasi multilateral yang dijalankan dapat menghasilkan solusi yang efektif. Kedua, Indonesia harus mampu untuk membangun legitimasi atas inisiatif dan norma yang diusulkan di forum multilateral, hal ini sendiri dibutuhkan baik untuk menjaga kredibilitas Indonesia sebagai pengusung norma tersebut, bahwasanya norma tersebut legit dan merupakan suatu hal yang solutif dalam karakternya tersendiri dan di waktu bersamaan juga sebagai alat “*blocking attitude*”; yang dimana berarti legitimasi yang dibangun bisa digunakan sebagai narasi utama untuk menekan para P5 agar mereka mempertahankan/ mengubah keputusan melalui kekuatan mereka dalam sesuatu institusi multilateral (Hart & Jones, 2010). Sebagai kesimpulan bagian ini, legitimasi, membangun jembatan, dan mencari negara dengan pendirian serupa menjadi tiga eksekusi inisial ketika Indonesia berdiplomasi di level multilateral secara keseluruhan, yang di mana penulis tegaskan hal ini tidak hanya untuk DK PBB saja, tapi di forum multilateral lainnya yang fokus pada pembentukan norma.

Realita keempat, bahwa forum multilateral memiliki keterbatasan, di mana pertemuan diplomasi multilateral memiliki legitimasi yang lebih lemah karena kritik semua orang adalah, forum multilateral tidak bisa menghasilkan suatu hal yang konkret. Realitanya adalah memang pertemuan diplomasi multilateral lebih lambat prosesnya karena semakin banyak negara yang berpartisipasi di level PBB, maka akan semakin kompleks proses pembentukan, penetapan, dan pembagian norma tersebut. Apalagi saat ini, terjadi penurunan derajat multilateralisme yang teruji di DK PBB dan bahkan PBB secara keseluruhan melalui COVID-19 yang memaksa semua negara harus egois, namun untungnya tidak pada waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan derajat multilateralisme memang menurun karena koalisi negara ataupun situasi yang sangat mengedepankan narasi nasionalis yang cukup populis di PBB (Goetz, 2020). Selain itu studi sebelumnya juga membahas bahwa masih terdapat

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perbedaan dari ambisi dan keinginan suatu negara untuk mendorong norma yang spesifik maupun norma yang lebih umum. Hal ini membuat tidak adanya kesamaan *sense of urgency* dan *ownership* dari negara yang berpartisipasi sebagai anggota negosiasi multilateral tersebut sehingga tidak semua hasil negosiasi memiliki *tone* yang kuat dan sangat bervariasi. Oleh karena itu, di situlah Indonesia contohnya, sebagai pembangun jembatan bisa masuk dan mendorong sinergi serta mengajak semua pihak untuk melihat isu pembahasan dari *standing point* yang sama. Hal ini pada studi sebelumnya di bahas serupa dan menggunakan contoh studi kasus saat menegosiasikan *Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects* di mana negara – negara dari Uni Eropa sangat vokal dalam negosiasi, Amerika Serikat hampir memblok seluruh konsensus, negara – negara Liga Arab yang terus melawan norma dan aksi yang konkret dalam draf, diamnya Tiongkok, dan lainnya yang sangat lazim juga hal ini ditemukan di forum multilateral termasuk DK PBB (Krause, 2002). Hal ini dalam DK PBB juga terjadi, termasuk pada saat Indonesia menjadi anggota, di mana setiap agenda yang di bahas di DK PBB harus memperoleh restu dari semua negara P5, dan umumnya isu – isu seperti Myanmar, Taiwan, dan isu yang sangat fenomenal namun tidak bisa dibahas karena setiap agenda yang diusulkan akan dinilai oleh P5 apakah layak dan sesuai dengan modalitas DK PBB di dalam Piagam PBB. Hal ini bersifat subyektif dan sangat kental akan tujuan politis karena kadang isu tersebut di dorong dan di veto oleh negara P5 dan tidak bisa di bahas karena rawan ini merupakan upaya – upaya politis antar *major power* untuk menekan satu sama lain. Umumnya ini terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia pada isu – isu di mana kedua negara menjadi proksi berlawanan dalam suatu konflik, kemudian Tiongkok yang tentunya akan memblok pembahasan isu Laut Cina Selatan (LCS) karena klaim mereka tidak berdasarkan UNCLOS 1982 tetapi *9-dash Line*, dan isu Rusia Ukraina yang di blok oleh Rusia untuk dibahas dan menghasilkan resolusi spesifik. Tentunya Indonesia dalam realita ini harus masuk dan menjadi pembangun jembatan agar setiap isu yang dibahas bukan merupakan dorongan politis

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

semata untuk menjatuhkan negara lain, tetapi merupakan kepentingan holistik untuk mencapai keamanan dan perdamaian internasional.

Realita kelima, negara *middle power* merupakan negara yang tidak bisa digeser dalam diplomasi multilateral karena mempunyai kapasitas normatif dan *behavioural* yang membuat mereka penting sebagai aktor lapisan kedua. Negara *middle power* termasuk yang menjadi anggota E-10 di DK PBB tentunya memiliki peran tidak hanya untuk melakukan aktivitas multilateral dalam suatu institusi internasional, tetapi juga bagaimana melihat dan melakukan aktivitas institusionalisasi dari multilateralisme itu sendiri. Kemudian penulis dalam realita kelima ini melihat bahwa negara *middle power* dalam forum multilateral seperti DK PBB tentu memiliki kemampuan untuk “memuaskan” atau dalam istilah diskusi bab ini, *satisfactory capabilities to satisfy the major power*. Negara *middle power* sebagai negara dalam lapisan menengah/ lapisan kedua tentu memiliki kekuatan dan peran utamanya sendiri untuk menjaga kelangsungan norma internasional dan sistem tata kelola yang dilaksanakan. *Middle power* memiliki kemampuan untuk mengusulkan dan membangun norma serta mendistribusikan norma yang di mana ini sejajar dengan apa yang menjadi paradigma/ ide dasar dari kelangsungan diplomasi multilateral Indonesia terutama sebagai dasar akan hal – hal konkret yang bermanfaat di tengah kepemimpinan Presiden Jokowi yang melihat kedalam. *Middle power* juga mengemban tugas khusus secara spesifik dalam tatanan keamanan dan perdamaian internasional dalam menghubungkan kekuatan – kekuatan besar yang di mana secara tradisional dan historis, dijalankan oleh *middle power*.

Realita keenam adalah *middle power* harus mampu mengatasi pengaruh di mana politik internasional akan sangat erat dengan politik negara besar *great power politics* karena ketika berbicara tentang multilateralisme, terutama DK PBB, akan bicara tentang kaitannya dengan negara P5. Hal ini juga menjadi *domino effect* terhadap kerja sama multilateral yang lain, maka kekuatan Indonesia adalah dalam penyampaian pandangan, bagaimana kita bicara, dan melakukan negosiasi untuk meredakan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ketegangan. Kemlu RI menurut penulis sudah memiliki kekuatan yang cukup di mana diplomat Indonesia sudah sangat handal dalam mencairkan suasana dan membangun jembatan di antara kepentingan politik dan ego polugri yang menjadi gejala yang memang lazim namun perlu di atasi dalam konteks diplomasi multilateral. Kedua, sebagai *middle power*, dengan Indonesia membangun peran sebagai *bridgebuilder* di forum

Realita ketujuh adalah untuk melihat apakah multilateralisme ini mengubah tatanan atau tidak, karena pada konteks ini akan sangat erat dengan nasionalisme dan kebijakan *inward looking*. Negara yang egois dan hanya mementingkan negaranya sendiri akan menjadi ujian untuk multilateralisme dan bagaimana menyuarakan norma yang berkontradiksi dengan realita kedua ini. Indonesia sebagai negara *middle power* tentu harus menyuarakan terus agar multilateralisme dalam DK PBB diperkuat sehingga PBB tidak hanya menjadi institusi yang menghasilkan norma dalam situasi reaktif, tetapi juga sebagai suatu institusi yang menghasilkan norma dalam situasi yang lebih proaktif. Hal ini cukup kompleks untuk dilakukan karena forum multilateral dibangun berdasarkan masa lalu dan tidak untuk secara antisipatif selesaikan masalah di depan. Forum multilateral tidak dibangun untuk problem solving dan di bangun berdasarkan masalah yang lalu dan bukan untuk penyelesaian masalah di depan. Misal ketika Indonesia terus menyerukan posisi terkait isu *Non Proliferation Treaty* (NPT), maka yang bergulir hingga saat ini dan apa yang diserukan Indonesia di DK PBB adalah untukantisipasi masalah proliferasi nuklir di masa depan. Dalam konteks ini, kita melihat ke dalam pribadi polugri Indonesia, apa yang kita punya sebagai modalitas untuk secara riil kita materalisasikan posisi Indonesia di level multilateral, yang juga termasuk dalam konteks keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB.

Dari benturan konsep dan realita maka akan ada tiga hal yang bisa dipertimbangkan dan ini yang menjadi gagasan penulis pada bagian ini untuk melihat kesinambungan peran sebagai pembangun jembatan pada forum multilateral *vis-a-vis* DK PBB. Pertama, *middle power* tidak selalu melulu tentang *hard power* karena kita

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

harus tahu bahwa Indonesia itu bukan *hard power* basis diplomasi *middle power*. Kekuatan Indonesia hanya unggul di ASEAN dan terlalu jauh apabila di bawa ke level Asia Pasifik sehingga oleh karena itu Indonesia melalui instrumen diplomasinya harus memperluas hal ini sambil melakukan asesmen mendalam sebelum, saat, dan sesudah melakukan sebuah restrukturisasi kebijakan luar negeri negara *middle power* dalam level multilateral termasuk di DK PBB. Kedua, ketika bicara *middle power* maka ada empat peran: balancer, mediator, bridgebuilder, dan advokasi *international understanding*. Penulis fokus pada peran sebagai *bridgebuilder* karena hal ini karakternya mendukung tiga proposisi peran lainnya. Ketika bicara *middle power* maka tentunya bagi Indonesia ada sejarah kita konsisten karena kekuatan *hard power* kita tidak cukup kuat. Indonesia harus melakukan *refocusing* ke usaha – usaha diplomasi multilateral yang tidak membutuhkan *hard power*. Ketiga, ketika bicara diplomasi multilateral, diplomasi bilateral tidak bisa dilupakan, Indonesia bisa pilih mau apa saja yang dilakukan dalam lingkungan eksternal dengan melihat kedalam apakah kita siap dan restrukturisasi yang dilakukan bisa dimainkan Indonesia.

Dalam DK PBB ini karena Indonesia bisa memilih mitra untuk *like minded countries* pada isu yang ingin Indonesia berpartisipasi di dalamnya. Perlu diketahui bahwa pertemuan bilateral saja tidak bisa karena aktualisasi kekuatan politiknya tidak terealisasi dengan baik, sehingga diplomasi multilateral dapat menambah kekuatan apabila kita bisa memanfaatkan hal ini untuk menutup keterbatasan. Harus ada parameter dalam memilih *like minded countries*, karena semakin banyak negara berpartisipasi dalam proses norma di level multilateral, maka akan kurang solutif dan efektif norma yang dibentuk sehingga harus ada seleksi. Penulis mengajukan dua parameter untuk memastikan kesinambungan diplomasi multilateral bersama *like minded countries* dengan posisi kebijakan luar negeri Indonesia yang telah terestrukturisasi. Pertama, Indonesia membangun parameter terkait apa potensi dan skenario yang bisa muncul dalam situasi yang kritis, optimis, dan oportunistis dari isu yang di bahas. Hal ini penting untuk menjadi kriteria dasar bagi Indonesia dalam

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berdiplomasi di level multilateral untuk menemukan *like minded countries* Pada situasi kritis, negara *likeminded*/ atau negara mitra multilateral ini (istilah yang digunakan untuk diskusi bab ini), pada situasi yang kritis bisa menyuarakan posisi yang sama dengan gesekan minimum pada kepentingan nasionalnya secara rasional (baik dalam perhitungan rasionalitas geopolitik, interdependensi ekonomi, dan perbedaan derajat kepentingan negara mitra tersebut dengan derajat kepentingan Indonesia). Kedua, Indonesia bisa membangun parameter di mana setiap negara secara sikap Indonesia dapat tetap mempertahankan ide bebas aktif dan dapat bersikap berimbang dan nyaman dalam mengusulkan normanya pada forum multilateral tanpa ada kekhawatiran akan *judgementalism* dari negara mitra tersebut yang bersifat produktif

Sebagai hal untuk menjadi perhatian, basis diplomasi multilateral Indonesia menurut penulis tentu bukan berdasarkan pada kekuatan (*power*) karena basis pelaksanaannya bukanlah demikian, tapi bagaimana Indonesia mempromosikan konsistensi *mutual understanding* dan dialog inklusif serta implementasi konkret melalui sumber – sumber power yang tidak terlalu keras *vis-a-vis* sekeras *hard power*. Jadi Indonesia bisa melakukan melalui pendekatan *behavioural* (perilaku) dan normatif sebagai posisi dan paradigma *norm setting* yang Indonesia lakukan di forum multilateral, termasuk ketika kita bicara dalam konteks DK PBB. Salah satu cara penting adalah selain daripada melakukan pencarian negara dengan posisi yang sinergis dengan Indonesia, tentu juga melalui usaha untuk melakukan diplomasi yang lebih terkonsolidasi.

B. Kestinambungan Peran *Bridgebuilder* dalam Diplomasi Multilateral *Middle Power* Indonesia di era Retno Marsudi

Diplomasi multilateral *middle power* Indonesia yang terbentuk tentunya harus antisipatif dan tidak bisa hanya menjadi kebijakan reaktif. Kepentingan agar adanya kebijakan yang antisipatif ini adalah karena negara besar rawan menggunakan forum multilateral untuk menekankan politik dan mendominasi forum multilateral. Terutama di DK PBB, kehadiran negara P5 sendiri merupakan unsur utama yang menjadi

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perhatian fokus posisi Indonesia melalui *role conception* kebijakan luar negeri yang melihat kedalam sebagai *middle power* yang menjadi pembangun jembatan. Studi sebelumnya menyatakan bahwa tindakan negara menengah selalu mengedepankan prediksi identifikasi situasi masa depan dan melakukan *institutional balancing* (He, 2008). Hal ini berarti, bahwa dalam konteks Indonesia, maka diplomasi sebagai pembangun jembatan juga di ambil sebagai intuisi negara dalam forum multilateral yang juga terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi tatanan global apakah itu unipolar, bipolar, maupun multipolar (He, 2008). Indonesia tentu melakukan apa yang menjadi keharusan dalam mempertahankan peran dan posisinya melalui kebebasannya untuk memiliki otonomi dalam mengelola pencapaian *middle power* menurut indikator yang telah terbentuk. Indikator ini sendiri terbagi dalam dua spektrum yaitu indikator perilaku diplomatik suatu negara (kepercayaan, hubungan jangka panjang, institusionalisasi kerja sama, tidak adanya veto, penggunaan *hard power* minim digunakan, dan mendorong prinsip non intervensi); dengan indikator pelaksanaan *soft power* (terciptanya koalisi per isu yang dibahas, kerja sama dan interaksi yang *ad hoc*, diplomasi melebar dari level kawasan, pengaruh jangka pendek, dan harus ada pembaharuan perjanjian dan protokol antar aktor) (Hidayatullah, 2021; Kim, Haug, & Rimmer, 2018).

Peran Indonesia sebagai negara yang membangun jembatan (*bridge-builder*) sendiri hadir dikarenakan proses yang unik sejak sebelum Indonesia menjadi anggota tidak tetap di DK PBB. Namun selain mengambil peran, dalam prosesnya tentu untuk menjadi seorang pembangun jembatan, sebuah negara harus meningkatkan “popularitas” dan kredibilitasnya terlebih dahulu agar dapat dipercaya untuk membangun jembatan sebagai identitas utama yang di proyeksikan (Patience, 2014). Selain itu, Indonesia sebagai negara juga ketika mengambil preferensi peran sebagai *middle power* dalam diplomasi multilateral harus memperhatikan apakah struktur kebijakan luar negeri yang dibangun telah menempatkan ide dan karakter sebagai negara *middle power* dalam hirarki kerangka kebijakannya *vis-a-vis* tataran normatif

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

operasional polugri untuk memastikan fungsionalitas *middle power* (Ungerer, 2007). Justifikasi menurut penulis yang paling masuk akal terkait hal ini adalah bahwa negara *middle power* akan senantiasa termotivasi untuk mengambil tanggung jawab baru yang lebih besar dalam organisasi internasional melalui nilai, strategi, dan kepentingan mereka sendiri dalam mencapai perubahan (*desire and pursuit of change*) dalam sistem internasional (Dal, 2014).

Setelah membahas mengenai bagaimana cita akan mencapai perubahan dapat dicapai, maka berikutnya adalah memahami bagaimana peran sebagai pembangun jembatan dalam forum multilateral dapat terwujud dengan memperhatikan apa saja “syarat” atau prekondisi yang dapat menjadi objektif utama Indonesia ketika berpartisipasi dalam DK PBB. Peneliti menyatakan bahwa penting untuk suatu negara *middle power* menyadari betul bahwa dalam materialisasi kekuatan yang mereka miliki yang dalam hal ini konteksnya tidak sempit dalam konteks *hard power*, penulis mendorong bahwa harus ada pembedahan ruang dalam tatanan global (dalam konteks ini adalah DK PBB sebagai bagian dari tatanan global) memiliki kondisi eksisting institusional yang dapat tegak lurus dengan Indonesia ketika kita bedah prekondisinya. Pertama, DK PBB yang sudah berdiri dan mematuhi standar, aturan, dan norma yang telah disepakati sebagai menjadi modalitas pendiriannya. Hal ini tentu dapat diacu pada instrumen penting seperti Bab 5 dari Piagam PBB serta resolusi SMU PBB lainnya yang menjadi kesepakatan normatif tentang aspek strategis dari operasionalisasi DK PBB. Hal ini juga karena mempertimbangkan juga bahwa anggota E-10 DK PBB dipilih oleh SMU PBB melalui voting. Kedua, kondisi eksisting dalam DK PBB memberikan jaminan bahwa keamanan Indonesia tidak akan terdegradasi sebagai akibat dari partisipasi Indonesia di DK PBB. Ketiga, partisipasi Indonesia di DK PBB tentunya sebagai *middle power* dilakukan dan dapat diterima oleh kondisi eksisting tersebut karena Indonesia adalah negara yang tidak dapat mendorong tatanan global dalam isu perdamaian dan keamanan global. Argumen ini merupakan pendalaman penulis dalam konteks Indonesia di DK PBB terhadap penelitian sebelumnya yang

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

membahas perspektif ini dari pemikiran neorealis yaitu: kesesuaian tatanan global terhadap keamanan nasional; tidak adanya toleransi akan pelanggaran/ *breach* dalam kepentingan keamanan mereka; dan tidak adanya otonomi dalam keterlibatan mereka di tatanan internasional (Wang & French, 2013).

Niscaya juga, peran *middle power* dapat dilihat bukan dari demonstrasi kekuatan mereka, namun lebih dalam kebijakan luar negeri yang kental akan perilaku ketimbang *measurement* atau pengukuran tingkat kekuatan (Cooper, Higgot, & Nossal, 1993). Hal ini sendiri dalam konteks Indonesia di DK PBB sejajar dengan apa yang Indonesia lakukan sebelumnya terkait isu keterkaitan antara terorisme dan kejahatan internasional, di mana Indonesia lebih melakukan pendekatan pada peningkatan kapasitas nasional dan tata kelola kebijakan domestik yang preventif dan aktual, ketimbang pada melaksanakan operasi anti terorisme yang mungkin mirip pada operasi *Global War on Terror* yang melibatkan *hard power* nyata yang diterjunkan ke negara – negara di Timur Tengah. Hal ini berarti, bahwa Indonesia terus mendorong pendekatan kooperatif, di mana Indonesia lebih mengedepankan kerja sama yang dapat mengurangi keterbatasan domestik dan meningkatkan kapabilitas nasional melalui kemitraan dengan pihak asing dipandu oleh norma DK PBB ketimbang implementasi operasi yang bersifat transnasional.

Berikutnya, *niche* dari diplomasi multilateral *middle power* adalah pendekatan membangun jembatan yang di kombinasikan juga dengan pendekatan unilateral atau bilateral, serta kemampuan untuk memilih kapan untuk terlibat/ melepas dirinya (negara *middle power*) dari proses multilateral (Cox, 1989; Wang & French, 2013). Contohnya yang menurut penulis paling relevan adalah ketika Indonesia membahas isu Afghanistan di DK PBB, Indonesia dalam hal ini mengadakan beberapa kegiatan terkait Afghanistan selama masa Presidensinya. Berbagai kegiatan selama keanggotaan di DK PBB adalah: (1) Indonesia mengadakan *Dialogue on the Role of Women in Building and Sustaining Peace in Afghanistan* pada tanggal 26 – 30 November 2019 di Jakarta; (2) Mendorong kontribusi komite 1988 Afghanistan melalui perpanjangan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

masa kerja tim monitoring; dan (3) memperkuat operasi perdamaian melalui UNAMA. Selain daripada kontribusi di DK PBB, Indonesia juga dalam hal ini membangun diplomasi bilateral untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebesar USD 10 juta hingga saat ini untuk program peningkatan kapasitas, UMKM, tata kelola, dan pengelolaan sumber daya di Afghanistan melalui mekanisme kerja sama teknik LDKPI (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional) (Setkab, 2021). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara *middle power* mampu membangun jembatan antara kepentingan kelompok P5 dan E-10 DK PBB pada isu Afghanistan pada dimensi yang lebih membumi (*people-centric*) yaitu isu wanita, serta kemudian juga melakukan kerja sama bilateral untuk meningkatkan kemandirian Afghanistan di tengah keterbatasan dan bukan dalam bentuk pasukan militer.

Diplomasi multilateral bagi *middle power* juga tidaklah melulu tentang bagaimana negara yang berminat untuk membentuk, menetapkan, dan membagikan norma untuk berdiplomasi, namun juga bisa dipandang oleh *middle power* sebagai level diplomasi yang memberikan ruang bagi para *major power* untuk *balancing* dengan *middle power* pada isu sensitif (Dal, 2014). Dalam konteks DK PBB, asumsi ini dapat dilihat dari adanya empat negara anggota P5 yang memiliki pendirian yang sinergis dengan Indonesia setelah bernegosiasi pada isu terorisme yang di mana waktu itu Indonesia menjadi *sponsor* pada ranres tersebut, namun karena ada salah satu dari lima P5 tersebut melakukan veto, maka diplomasi yang dibangun Indonesia dengan 14 negara DK PBB lainnya yang telah menyetujui ranres tersebut akan menjadi kurang signifikan. Dari sini kita melihat AS yang menjadi satu – satunya negara yang menolak ranres tersebut telah melakukan *balancing* terhadap usaha *middle power* dalam mengusung sesuatu pada isu sensitif. Kaitannya dengan narasi pembangun jembatan yang ditonjolkan penulis pada bab ini adalah, bahwa membangun jembatan di atas perbedaan juga bicara signifikansi dari proses yang dibentuk dan bagaimana hasilnya dapat menjadi hal yang fungsional bagi negara dalam menyelesaikan isu sensitif. Namun terkadang realitanya berbeda dan perbedaan modalitas, pemahaman, dan faktor

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lainnya antara negara P5 dan E-10 akan terus senantiasa menentukan cara *middle power* mendekati *major power* serta bagaimana stratifikasi dalam sistem internasional terbentuk karena hal ini menjadi perhatian penting (Teo, 2022).

Dalam isu Palestina juga, Indonesia tahu betul dan sesama anggota DK PBB lainnya juga mengerti, bahwa isu Palestina menjadi agenda utama 4+1 Indonesia dalam masa keanggotaannya di DK PBB. Prioritas utama yang mudah diketahui sebagai stigma yang ditempelkan ke Indonesia sebagai pembela Palestina di DK PBB memberikan beberapa keuntungan: (1) semua negara sudah tau apa tujuan Indonesia membangun jembatan, dan mereka sudah bisa mempelajari apa yang menjadi kepentingan Indonesia, dan mengetahui bahwasannya solidaritas Indonesia ke Palestina adalah keniscayaan yang dimandatkan secara konstitusional dan bukan sesuatu yang sebatas politik dan agenda anti barat/ sebagainya; (2) Indonesia dalam proses membangun jembatan sudah dapat memetakan respons dan sentimen yang mungkin akan menjadi posisi negara *counterpart* dalam berdiplomasi terkait isu Palestina. Hal ini menurut penulis menjadi salah satu argumen karena apabila lawan bicara kita tidak mengerti betul intensi dan muatan kepentingan kita secara substansi, maka kemungkinan untuk mispersepsi akan semakin besar. Oleh karena itu, peran DK PBB dalam hal ini menjadi forum dialog, dan Indonesia kedepannya bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina sambil secara aktif mengawal agar komunitas internasional tidak melupakan hal ini. Saat di DK PBB tentunya apa yang Indonesia lakukan adalah menyampaikan argumen yang bisa membuka keseimbangan jembatan antar negara di DK PBB untuk terus *recalling* keputusan DK PBB sebelumnya dan agar implementasi *two state solution* dapat dilakukan dengan kemungkinan resonansi yang kuat di forum lain seperti OKI (Saragih, 2018).

Indonesia juga terus membangun *link-and-match* yang kuat antara lingkungan eksternal yang sangat sensitif terkait isu teritorial sehingga peran menjadi pembangun jembatan setidaknya menempatkan Indonesia di posisi tawar yang lebih netral. Menu Retno sampaikan bahwa diplomasi Indonesia di DK PBB akan menggunakan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pendekatan komprehensif untuk memastikan semua aspek, contohnya pada isu Palestina, dapat tertangani dengan baik dan aktivitas multilateral terkait hal tersebut bisa terus dilanjutkan guliran bahasannya untuk memberi urgensi dan tekanan politis (Khoirunnisa & Budiman, 2021).

Ketika kita sedang berdiplomasi, kadang negara dihadapi oleh pandangan yang saling berkontradiksi yang kemudian akan memancing perdebatan dan oleh karena itu Indonesia sebagai pembangun jembatan harus memastikan agar setiap debat yang terjadi dalam negosiasi di DK PBB tidak destruktif terhadap substansi konstruktif yang seharusnya menjadi *flow* negosiasi. Salah satu cara yang umumnya dilakukan oleh suatu negara yang menjadi Presiden DK PBB saat itu adalah dengan secara hati – hati dan presisi menyusun *concept note* pertemuan untuk menjelaskan tujuan, bahasan, dan poin diskusi yang harus dicapai agar semua pandangan dapat diutarakan oleh seluruh negara anggota DK PBB tanpa ada insersi pandangan yang tidak relevan dan hanya merusak *flow* substansi. Sebagai pembangun jembatan pula, Indonesia harus memastikan agar ada sinergi dengan negara – negara *likeminded* untuk menjadi suara tambahan bagi narasi yang didorong Indonesia. Kemudian, setelah Indonesia menemukan negara yang memiliki pandangan yang sama tersebut, Indonesia bisa menjalin pembangunan aliansi yang bersifat *ad hoc* untuk isu – isu khusus terutama isu kawasan di Asia Pasifik (Sitamala, 2020).

Kemudian, penulis juga ingin membahas salah satu argumen yang sering muncul yaitu diplomasi multilateral tidak dapat dibenturkan dengan diplomasi bilateral. Hal ini tentu merupakan sebuah fakta mutlak bagi penulis karena diplomasi multilateral dan bilateral walaupun derajat hasil dan tindak lanjut pertemuannya beda, nexus antara bilateral dan multilateral menjadi salah satu kekuatan negara *middle power* dalam mendorong kepemimpinan dan perannya. Ketika di forum multilateral Indonesia menggalang dukungan, seperti apa yang dilakukan dalam kampanye untuk pemilihan umum anggota DK PBB, Indonesia mendekati beberapa negara secara bilateral untuk saling dukung dalam pencalonan antar negara *middle power* di

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

organisasi internasional. Untuk Indonesia, memang pendekatan bilateral menjadi favorit Presiden Jokowi, namun hal tersebut hanya lebih sempit dalam polugrinya di tataran isu kawasan (Drajat, 2019). Walaupun demikian, namun penulis bahwa Presiden Jokowi belum meninggalkan multilateralisme, malah diplomasi multilateral masih penting dan menjadi posisi Indonesia. Contohnya adalah, ketika Indonesia berdiplomasi di ASEAN dan berpartisipasi di DK PBB dalam menyelesaikan isu politik dan keamanan, Indonesia akan menggunakan aksi terdahulu/ kesepakatan multilateral yang diadopsi sebelumnya sebagai norma dan prinsip dasar/ modalitas.

Contohnya, ketika Indonesia menyampaikan pandangan tentang terorisme pada Oktober 2019 di DK PBB maupun pada pertemuan *Senior Officials/ Sectorial Meetings* lainnya di ASEAN, Indonesia selalu menggunakan beberapa acuan dari kerangka PBB sebagai referensi dalam pidatonya: *United Nations Office on Counter Terrorism (UNOCT/UNCCT)*, *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, *Terrorism Prevention Branch- United Nations Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC)*, and *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED)*, dan semua empat pilar daripada *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS)*. Indonesia dalam hal ini juga ketika menjadi *Chair* pada pertemuan *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)*. Serta, Indonesia juga terus melakukan pendekatan bilateral dengan *middle power* yang memiliki posisi sama di kawasan seperti Jepang dan Australia untuk isu terorisme untuk memperlengkapi apa yang Indonesia tegaskan pada forum multilateral terkait beberapa isu: *Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Weapons; Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational Crime* yang memiliki 49 negara dengan berbagai kelompok kerja; dan mekanisme multilateral – regional lainnya. Penulis melihat bahwa Indonesia memperkuat diplomasi multilateral secara signifikan dengan mengaktualisasikan hasil kerja diplomasi multilateral secara regional dan bilateral.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada DK PBB, Indonesia juga mendorong penyelesaian isu melalui kolaborasi multilateral dan bilateral dengan membangun jembatan antara forum multilateral dengan organisasi regional dalam isu keamanan. Indonesia juga mendorong pembangunan jembatan antar negara maju untuk menerbitkan *Presidential Statement* DK PBB terkait serangan teroris di Afghanistan, Iran, Filipina, Selandia Baru, dan Sri Lanka. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi selama menjadi anggota DK PBB untuk membangun jembatan antara kapasitas negara maju dan berkembang dalam mengelola rezim internasional untuk resolusi konflik seperti: (1) 1267 *Sanction Committee* di mana Indonesia menjadi anggota untuk manajemen sanksi yang diberikan kepada afiliasi ISIS dan Al Qaeda, di mana Indonesia memainkan peran untuk membangun jembatan di tengah perbedaan kepentingan negara dalam menempatkan daftar teroris yang cenderung politis dan subjektif parameteranya; (2) 1540 *Sanction Committee* di mana Indonesia diberikan kepercayaan menjadi *Chair* untuk mencegah persebaran senjata pemusnah massal oleh aktor bukan negara; dan (3) 1988 *Sanction Committee* untuk urusan Taliban di mana Indonesia kembali ditunjuk menjadi *Chair* serta menjadi *Deputy Chair* pada *Sanction Committee* lain untuk Sudan Selatan dan Irak (Anggoro, 2019).

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]